

Reposisi Struktur Humas pada Perguruan Tinggi Islam

Muhdlar Abdullah
STIDKI Al-Hamidy, Pamekasan
hmuhdlorabdullah@gmail.com

Abstract

The presence of Public Relations (PR) in higher education institutions plays a crucial role in supporting the implementation of the university's work programs. Based on Government Regulation No. 60, Articles 27 and 35, PR is established as one of the executing units in the field of information and public relations. Previously, the PR function was under the Subdivision of Law and Administration BAUK, but it has now been transferred to the Technical Implementation Unit (UPT) of PR due to the importance of its role. These two articles state that if a supporting unit is deemed vital, it can be formed as a UPT. Therefore, PR must have a clear position within the organizational structure of the university to ensure that its functions are carried out effectively and systematically. As part of an organized system, PR contributes to the development of the university through various communication activities that are harmonious and systematic, as well as the management of information. The strategic placement of PR will facilitate a clearer understanding of its duties and responsibilities in a professional manner. The organizational structure of PR in a higher education institution includes various fields, such as the head of PR, deputy head of PR, secretariat, publication, protocol, public services, print media, audiovisual media, as well as research and training, each of which has specific duties in accordance with the job descriptions that have been established.

Keywords: Repositioning, Structure, Public Relations, Higher Education Institution

Abstrak

Keberadaan Hubungan Masyarakat (Humas) di perguruan tinggi memiliki peran yang sangat vital untuk mendukung pelaksanaan program kerja perguruan tinggi. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 pasal 27 dan 35, Humas dijadikan salah satu unit pelaksana dalam bidang informasi dan hubungan masyarakat. Sebelumnya, fungsi Humas berada di bawah Subbagian Hukum dan Tatalaksana BAUK, namun kini dialihkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Humas karena pentingnya peranannya. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa jika suatu unit penunjang dianggap vital, maka unit tersebut dapat dibentuk dalam bentuk UPT. Oleh karena itu, Humas harus memiliki posisi yang jelas dalam struktur organisasi perguruan tinggi untuk memastikan bahwa fungsinya dapat berjalan dengan efektif dan terstruktur. Sebagai bagian dari sistem yang terorganisir, Humas berkontribusi dalam perkembangan perguruan tinggi melalui berbagai kegiatan komunikasi yang harmonis dan sistematis, serta pengelolaan informasi. Penempatan Humas dalam posisi strategis akan mempermudah pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban secara profesional. Struktur organisasi Humas di perguruan tinggi meliputi berbagai bidang, seperti kepala Humas, wakil kepala Humas, sekretariat, publikasi, protokol, pelayanan masyarakat, media cetak, media audiovisual, serta penelitian dan pelatihan, yang masing-masing memiliki tugas sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Reposisi, Struktur, Hubungan masyarakat, perguruan tinggi.

Pendahuluan

Perguruan tinggi Berlomba-lomba untuk memperbaiki tatatan atau pengelolaan lembaganya yang tidak hanya berkutat dalam skala lokal atau regional, namun persaingan perguruan tinggi saat ini masuk pada ranah nasional bahkan internasional. Untuk mempersiapkan proses perkembangan tersebut yang perlu diperhatikan adalah unsur kualitas dan kuantitas, kedua unsur tersebut sangat penting bagi perguruan tinggi karena adanya kuantitas yang memadai, misalkan dalam hal jumlah mahasiswa, ia dapat menumbuhkan persepsi masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut favorit, karena banyaknya minat masyarakat untuk masuk di perguruan tinggi tersebut.

Menjalin hubungan masyarakat merupakan suatu keharusan bagi setiap lembaga perguruan tinggi, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam Surat Ali Imran (3) ayat 112: yang artinya: *"mereka diliputi kebinasaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas."*¹

Kata *hablu-minannas*, adalah merupakan interpretasi dimensi sosial yang mana manusia adalah makhluk yang membutuhkan proses interaksi dan hubungan dengan orang lain, begitu juga pada lembaga perguruan tinggi setiap sumber daya yang ada tentunya membutuhkan hubungan dengan sumber daya yang lain, misalkan hubungan pimpinan dengan bawahan atau karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Adanya hubungan yang harmonis akan memperkuat sinergitas perguruan tinggi tetap bertahan dan berkembang, dalam hadits riwayat Bukhari Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *"Barangsiapa ingin dilapangkan rizqinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungkan tali kekerabatan."* Riwayat Bukhar.²

Kata *fal-yashil* dalam hadits diatas secara maknawi mempunyai arti menghubungkan, maka secara interpretasi hadits diatas memberikan penjelasan bahwa dalam lembaga pendidikan jika lembaga ingin tetap bertahan sebagai lembaga yang profesional maka seyogyanya ia melakukan hubungan dengan pihak lain, baik lembaga organisasi lain, pemerintah, dan masyarakat, esensi hadits diatas menggambarkan bahwa jika seseorang ingin dilapangkan rizqinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaknya ia melakukan tali kekerabatan, kata dilapangkan rizqi, jika ditarik pada lembaga pendidikan adalah kesejahteraan

¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al Huda, 2005), hlm. 65

² Dani Hidayat, *Bulughul Maram versi 2.0* © 1429 H / 2008 M Oleh : Pustaka Al-Hidayah, Hadits No. 1483.

dalam konteks pendanaan pendidikan, sedangkan berkaitan dengan umur adalah eksistensi lembaga, samapai kapan lembaga itu bertahan hidup detengah-tengah masyarakat. Maka tidak salah kemudian jika hadis diatas menganjurkan bahwa dalam mencapai kedua-duanya adalah dengan proses hubungan masyarakat.

Menurut Uhar Suharsaputra membangun hubungan menjadi sangat penting karena akan memberikan kontribusi bagi modal sosial yang juga penting bagi penciptaan keunggulan kompetitif organisasi.³ Maka dalam upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat, lembaga perguruan tinggi Islam seharusnya melakukan hubungan dengan masyarakat yang lebih harmonis, karena dalam konteks otonomi pendidikan masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* lembaga perguruan tinggi yang mempunyai peran penting dalam memajukan sebuah perguruan tinggi Islam. Hubungan organisasi atau lembaga perguruan tinggi merupakan hal harus dilakukan secara profesional untuk mewujudkan lembaga yang terpercaya.

Maka sudah sepatutnya perguruan tinggi Islam melakukan relasi dan komonikasi dengan masyarakat yang lebih inten agar kerjasama mengarah kepada kerja sama dan komonikasi dua arah dalam proses pelaksanaan pendidikan, kebutuhan masyarakat akan mudah terpenuhi sehingga perguruan tinggi dan masyarakat tidak bertolak belakang. Terkadang yang terjadi dilapangan justru masyarakat mengasumsikan bahwa kerja sama lembaga pendidikan dan masyarakat masih bersifat *one way traffic communication* yaitu hanya menguntungkan satu pihak, lembaga pendidikan hanya mau mendapatkan keuntungan saja dari masyarakat tanpa ia memberikan kontribusi dan respek terhadap kebutuhan masyarakat. Maka disinilah bentuk kesalahan yang terjadi dalam proses hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Idealnya komonikasi yang dilakukan lembaga perguruan tinggi dengan masyarakat bersifat *two way traffic communication* yaitu komunikasi dua arah yang artinya suatu komonikasi mampu diarahkan terhadap perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh, antara masyarakat lembaga terjadi koneksifitas dan saling menguntungkan.

Untuk menciptakan hubungan yang demikian tentu dibutuhkannya eksistensi humas secara melembaga, karena pada kenyataannya humas dalam organisasi perguruan tinggi masih belum mendapatkan tempat yang strategis, posisi humas dalam perguruan tinggi masih menjadi masalah yang serius, adanya upaya reposisi humas akan menempatkan humas sebagai lembaga yang mempunyai peran urgen terhadap pembentukan citra lembaga, maka dengan adanya revisi kembali terhadap posisi struktur humas pada perguruan tinggi, humas akan berperan sebagai lembaga profesional yang selalu menjaga informasi dan mendistribusikan informasi secara terprogram. Maka dengan demikian pertanyaan mendasar adalah 1). bagaimana posisi humas dalam organisasi perguruan tinggi? 2). bagaimana humas dalam bentuk unit pelaksana teknis dalam organisasi perguruan tinggi? 3). bagaimana tugas satuan bidang

³ Uhar Suharsaputra, *Manajemen Perguruan Tinggi Strategi Menghadapi Perubahan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 158

humas dalam organisasi perguruan tinggi?.

Tinjauan Pustaka: Tugas Satuan Bidang Humas

Tugas satuan bidang humas di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengelola komunikasi antara universitas dengan masyarakat, media, serta berbagai pihak lainnya. Menurut Zulkainain, struktur humas di perguruan tinggi terdiri dari berbagai bagian yang saling mendukung untuk mencapai tujuan humas. Struktur ini meliputi kepala humas, wakil kepala humas, sekretariat, unit publikasi, unit protokol dan pelayanan masyarakat, media cetak humas, media audio visual, dan unit pelatihan serta penelitian. Kepala humas memegang peran utama dalam mengelola kegiatan humas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rektor. Tugas kepala humas meliputi tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan humas, merencanakan dan mengelola program kegiatan humas, serta memberikan masukan kepada rektor mengenai opini yang berkembang tentang lembaga. Kepala humas juga berperan dalam menjalin hubungan kerja sama dengan media massa serta instansi atau lembaga lain, serta mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan humas yang telah dilakukan. Kepala humas memiliki tugas yang sangat besar untuk memastikan bahwa kegiatan humas berjalan dengan baik, memberikan citra positif kepada universitas, serta memelihara hubungan yang harmonis antara universitas dengan masyarakat.⁴

Wakil kepala humas memiliki tugas untuk membantu kepala humas dalam mengelola kebijakan yang telah ditetapkan oleh rektor, serta dalam mengelola informasi yang terkait dengan kebijakan universitas. Wakil kepala humas juga mengawasi pelaksanaan kegiatan di unit-unit humas dan menggantikan kepala humas apabila kepala humas tidak dapat hadir. Selain itu, wakil kepala humas berperan dalam menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan, serta mengembangkan model layanan informasi yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Sekretariat humas berfungsi sebagai pengelola administrasi di bagian humas. Tugas sekretariat antara lain mencakup pengelolaan surat masuk dan keluar, pengetikan pers release dan naskah berita, serta pengarsipan berbagai bahan publikasi seperti bulletin, brosur, dan selebaran yang diterima dari unit kerja lainnya di perguruan tinggi. Selain itu, sekretariat juga bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan bagian humas, perlengkapan barang dan alat tulis kantor, serta membuat laporan penggunaan keuangan setiap bulan kepada unit terkait. Sekretariat juga mengumpulkan dan mendokumentasikan data tentang perguruan tinggi, serta mengarsipkan foto-foto kegiatan universitas yang dapat digunakan untuk publikasi di masa depan.

Unit publikasi memiliki tanggung jawab utama dalam mempublikasikan berbagai kegiatan yang ada di lingkungan perguruan tinggi kepada masyarakat luas. Unit ini menggunakan berbagai saluran media, baik cetak maupun elektronik, untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan universitas, fakultas, lembaga, dan unit lainnya. Unit publikasi juga berperan dalam menyusun naskah pers release, membantu kepala dan wakil kepala humas dalam memberikan

⁴ Haryanto, A., & Setiawan, M. *Peran Humas dalam Pembangunan Citra Perguruan Tinggi*. (Surabaya: Penerbit Andi, 2022), hlm. 17.

informasi kepada masyarakat, serta mengoreksi atau mengkonter pemberitaan yang salah di media massa. Unit ini juga membuat laporan tentang kegiatan humas yang dilakukan, baik secara berkala maupun tahunan, untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian kegiatan humas selama periode tertentu. Unit protokol dan pelayanan masyarakat berfungsi untuk mengatur keprotokolan, pengambilan data, dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan universitas. Unit ini juga mengatur pengunjung atau tamu yang datang ke universitas, termasuk menghubungi wartawan dari media cetak dan elektronik, serta merancang dan melaksanakan kegiatan seperti open house dan pers tour. Selain itu, unit ini juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai master of ceremony (MC) dalam acara-acara resmi yang diadakan oleh universitas.

Unit media cetak humas berperan dalam penyelenggaraan penerbitan media cetak internal universitas, seperti majalah kampus, bulletin, atau surat kabar internal. Unit ini merencanakan isi media cetak, membagi tugas reportase, mengumpulkan dan mengedit naskah, serta mengevaluasi hasil penerbitan untuk memastikan bahwa media cetak internal dapat menyampaikan informasi dengan baik kepada civitas akademika dan masyarakat. Unit media audio visual memiliki peran dalam merekam dan mendokumentasikan kegiatan universitas dalam bentuk audio visual, baik untuk keperluan internal maupun publikasi di media elektronik seperti televisi. Unit ini meliputi kegiatan universitas, fakultas, lembaga, dan unit lainnya, serta menyusun naskah release berita untuk dikirimkan ke media massa. Selain itu, unit ini juga membuat profil universitas dalam bentuk video yang dapat digunakan untuk memperkenalkan universitas kepada masyarakat luas, serta mempersiapkan media audio visual untuk keperluan pameran atau kunjungan tamu eksternal.

Unit penelitian dan pelatihan bertugas untuk menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi praktisi atau tenaga fungsional humas. Unit ini juga menyusun pertanyaan yang diberikan kepada responden seperti mahasiswa, dosen, karyawan, alumni, dan masyarakat untuk mengetahui opini publik terkait peristiwa atau masalah tertentu yang berkaitan dengan universitas. Selain itu, unit ini juga menyebarkan angket untuk survei pendapat, serta menyusun rencana pelatihan dan diskusi ilmiah yang berkaitan dengan kegiatan humas.⁵

Pembagian tugas dan fungsi secara profesional yang diberikan kepada setiap satuan bidang teknis humas akan memberikan kontribusi terhadap optimalisasi kinerja bidang humas dalam melaksanakan tugasnya, adanya pembagian tugas sesuai *job discription* tersebut akan menumbuhkan pemahaman dan tanggung jawab bagi setiap bidang yang bertugas untuk selalu memperhatikan apa yang harus dikerjakan. Humas dalam hal ini akan membantu terhadap proses perkembangan kampus dengan berbagai strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh humas, namun hal tersebut bisa terjadi jika peran pemimpin perguruan tinggi atau rektor memberikan dukungan untuk selalu melaksanakan tugas pokok sebagai kewajiban yang harus dikerjakan, kepemimpinan dalam proses implementasi sangat dibutuhkan dalam bentuk optimalisasi kinerja bidang

⁵ Zulkarnaen Nasution, *Manajemen humas*,

humas, sehingga peran dan fungsi humas akan maksimal sesuai dengan tujuan.

Hasil Penelitian

Posisi Humas Dalam Organisasi Perguruan Tinggi

Posisi Humas pada perguruan tinggi merupakan hal yang sangat krusial dalam upaya membantu proses pengembangan lembaga, Berdasar kenyataan, Sampai sekarang posisi humas dalam sebuah organisasi Perguruan Tinggi masih menjadi suatu masalah yang pelik bagi organisasi yang bersangkutan. Karena posisi humas dalam suatu struktur organisasi setiap Perguruan Tinggi tidaklah sama, tergantung pada perhatian dan keinginan pimpinan memandangi apakah peran humas itu penting atau tidak. Pengorganisasian dapat diartikan penetapan dan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan pada setiap anggota, penempatan-penempatan departemen-departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan.⁶ Oleh karena itu perlu merevisi kembali posisi humas pada struktur organisasi Perguruan Tinggi yang belum sepenuhnya mendapat tempat yang sesuai, sebagai agen profesional yang selalu menjaga informasi dan mendistribusikan informasi dalam bentuk program, aktivitas dan kebijakan pimpinan.

Bertolak dari posisi humas dalam struktur organisasi Perguruan Tinggi dapat ditentukan determinasi pada strategi apa yang akan dijalankan atau digunakan Perguruan Tinggi tersebut. Asumsi inilah yang membedakan kedudukan dan strategi yang digunakan dalam setiap organisasi Perguruan Tinggi, hal ini dengan alasan: *Pertama*, ditentukan ukuran organisasi Perguruan Tinggi, artinya besar atau kecilnya suatu Perguruan Tinggi akan menentukan kedudukan dan strategi humas yang akan digunakan oleh suatu organisasi. *Kedua*, ditentukan nilai atau arti pentingnya fungsi humas bagi pihak pimpinan manajemen terhadap nilai signifikan humas, ditentukan pula pada apa dan bagaimana kedudukan dan strategi humas itu dijalankan dalam suatu organisasi Perguruan Tinggi. Pandangan ini terutama tergantung pada pandangan pihak pimpinan dari Perguruan Tinggi dalam melihat fungsi dan peran humas dalam suatu organisasi.

Ketiga, ditentukan karakteristik khas atau cirri-ciri khas kehumasan masing-masing lembaga Perguruan Tinggi. Faktor ketiga sangat ditentukan oleh kredibilitas, kapabilitas, akuntabilitas, dan profesionalitas pihak humas dalam suatu organisasi Perguruan Tinggi. *Keempat*, posisi humas ditentukan aturan yang dibuat suatu lembaga, artinya ada aturan yang telah dibuat suatu Perguruan Tinggi yang meletakkan kedudukan pada struktur yang telah diatur dalam aturan yang tertulis, seperti pada organisasi tata kerja (OTK) dan Statuta Universitas.⁷

Sebagian besar perguruan tinggi negeri memposisikan struktur humas diletakkan pada struktur paling bawah, yakni pada Sub Bagian (Subbag),

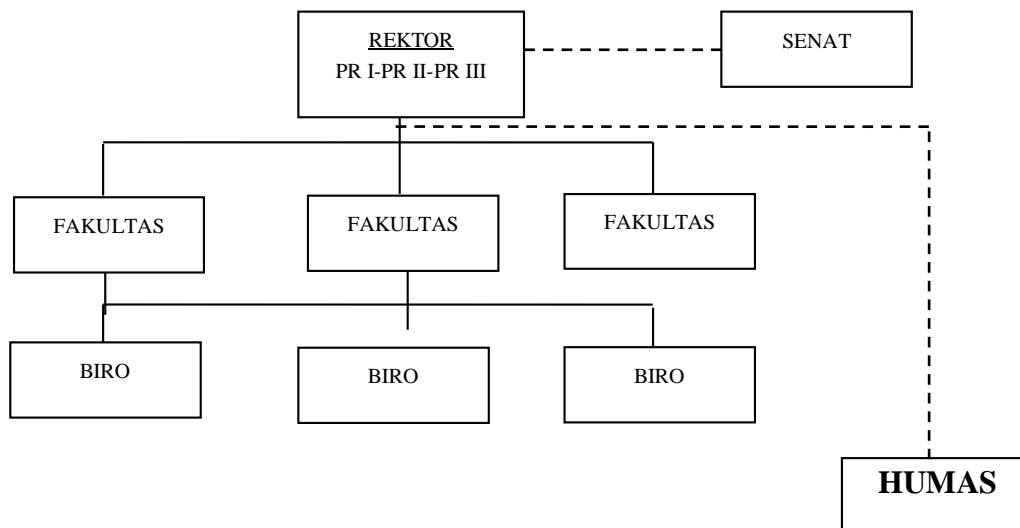
⁶ Ahmad Fatah Yasin, *Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam*, (Malang: UIN-Malang Press 2012), hlm. 20.

⁷ Zulkarnain Nasution, *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan, Konsep, Penomena dan Aplikasinya*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 74,

sehingga dengan kedudukan ini membuat strategi dan aktivitas humas selalu mendapat hambatan khususnya pada birokrasi di Perguruan Tinggi dalam menerima dan menyampaikan informasi, saran, dan pendapat tersebut. Misalnya, banyak humas di PTN yang meletakkan struktur humas pada tingkat paling bawah dan bahkan yang menjadi keprihatinan, kedudukan humas itu tidak ada didalam suatu struktur organisasi pada PTN, hal ini dikarenakan kebijakan aturan yang dibuat oleh pimpinan yang merasa peran humas itu tidak sangat penting. Padahal dewasa ini Perguruan Tinggi dituntut bisa mempromosikan, menjual hasil produknya berupa sumber daya manusia kepada lembaga Pendidikan dan masyarakat.⁸

Dalam hal ini humas adalah pihak yang menjadi saluran penghubung semua kepentingan yang ada di lembaga perguruan tinggi. Fungsi humas secara struktural dalam organisasi Perguruan Tinggi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kelembagaan atau organisasi, sekaligus terkait langsung dengan fungsi top manajemen.⁹ Karena itu kehadiran peran humas dalam sistem manajemen suatu lembaga sudah selayaknya dilakukan secara optimal. Fungsi kehumasan itu diharapkan berhasil kalau berada dibawah pimpinan atau mempunyai hubungan langsung dengan pimpinan tertinggi (pengambil keputusan) pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Artinya fungsi humas dalam menyelenggarakan komunikasi dua arah antara pimpinan Perguruan Tinggi yang diwakilinya dengan *public intern* dan *public ekstern*, dalam hal ini masyarakat sebagai khalayak sasaran yang pada akhirnya dapat menentukan sukses atau tidaknya tujuan dan citra yang hendak dicapai Perguruan Tinggi tersebut.

Contoh: Posisi humas pada struktur perguruan tinggi.



Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

⁸ T. Hani Handoko, *MANAJEMEN Edisi Kedua*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 24.

⁹ Ihram Fahmi, *MANAJEMEN, Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 12.

Susunan Perguruan Tinggi bagaimana dijelaskan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Pendidikan Tinggi, terdiri dari: a) dewan penyalutan, b) unsur pimpinan, c) unsur dosen, d) senat perguruan tinggi, e) unsur pelaksana akademik; bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, f) unsur pelaksana administrative, dan unsur penunjang untuk pelaksana (UPT), meliputi: perpustakaan, laboratorium, bengkel, kebun percobaan, pusat computer, dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau professional pada perguruan tinggi yang bersangkutan.¹⁰

Berdasarkan definisi di atas, bahwa dalam suatu organisasi minimal mengandung tiga elemen yang satu sama lain sulit dipisahkan. Ketiga elemen organisasi tersebut yaitu, sekelompok orang, interaksi dan bekerja sama, dan tujuan bersama. Istilah organisasi diambil dari bahasa Inggris "*Organization*" yang berarti "hal yang mengatur" dan kata kerjanya "Organizing", berasal dari bahasa Latin "*Organizer*" yaitu mengatur dan menyusun.¹¹ Jadi organisasi humas merupakan suatu sistem dan proses kegiatan dalam usaha kerjasama yang dilakukan sekelompok orang untuk tujuan bersama. Untuk dapat merealisasikan tujuan bersama dari sekelompok orang tersebut perlu adanya struktur organisasi. Humas dalam menetapkan struktur organisasinya berbentuk lini dan staf. Staffing adalah penempatan orang-orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi.¹² Strukturisasi dalam sebuah organisasi merupakan hal yang sangat menunjang terhadap implementasi program yang harus dijalankan, adanya struktur tersebut diharapkan bagaimana organisasi mampu menempatkan tugas pokok bagi setiap anggota sesuai dengan kebijakan yang dihasilkan dengan proses staffing.

Humas Dalam Bentuk Unit Pelaksana Teknis

Kegagalan lembaga pendidikan bukan hanya dipicu oleh faktor pendanaan semata, namun salah satu bentuk penyebab utama dari kegagalan lembaga pendidikan karena faktor struktur organisasi yang tidak jelas, realitas dilapangan telah banyak lembaga yang mengalami stagnan dan bahkan bubar tinggal bangunannya saja dikarenakan karena menganggap remeh terhadap pentingnya strukturisasi dalam lembaga, padahal idealnya setiap lembaga apapun baik skala besar maupun kecil, harus mempunyai struktur yang jelas, adanya sstruktur tersebut sebenarnya akan memperjelas setiap apa yang harus dikerjakan dan menjadi tanggung jawab bagi semua anggota yang ada dalam organisasi, sehingga antara satu dengan yang lainnya akan bekerja sesuai dengan job masing-masing, selain tersebut struktur juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dari organisasi, termasuk juga dalam humas dalam perguruan tinggi.

¹⁰.MENPAN, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara No.117/KEP/M.PAN/10/2003, tentang jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat dan angka keriditnya.

¹¹. Achmad Mohyi, *Teori dan Perilaku Organisasi*, (Malang: UMM Press1999), hlm. 1.

¹².Baharuddin & Moh Makin, *Manajemen Pendidikan Islam, Transformasi Menuju Sekolah/Madrasah Unggul*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 104.

Struktur organisasi Universitas atau Institut dijelaskan pada pasal 35 PP Nomor 60, "Organisasi universitas terdiri dari: a) unsur pimpinan: rector dan pembantu rector, b) senat universitas/institute, c) unsur pelaksana akademik: fakultas, lembaga penelitian, dan lembaga pengabdian kepada masyarakat, d) unsur pelaksana administrasi: biro, e) unsur penunjang: unit pelaksana teknis, f) unsur lain yang dianggap perlu."¹³

Peraturan pemerintah diatas mengisyaratkan bahwa humas sebagai salah satu unit pelaksana di bidang informasi dan hubungan masyarakat pada Perguruan Tinggi. Maka idealnya posisi humas selayaknya dirubah dalam bentuk unit pelaksana teknis yang mana awalnya humas hanya berada dalam sub bagian umum, pasal diatas telah memberikan keleluasaan bagi setiap perguruan diperbolehkan untuk membuat unsur penunjang jika dirasa perlu, seperti humas dalam perguruan tinggi, maka keberadaan humas dalam perguruan tinggi agar maksimal dalam kinerjanya perlu dibentuk lembaga independen sebagai lembaga unit pelaksana teknis dengan struktur yang jelas.

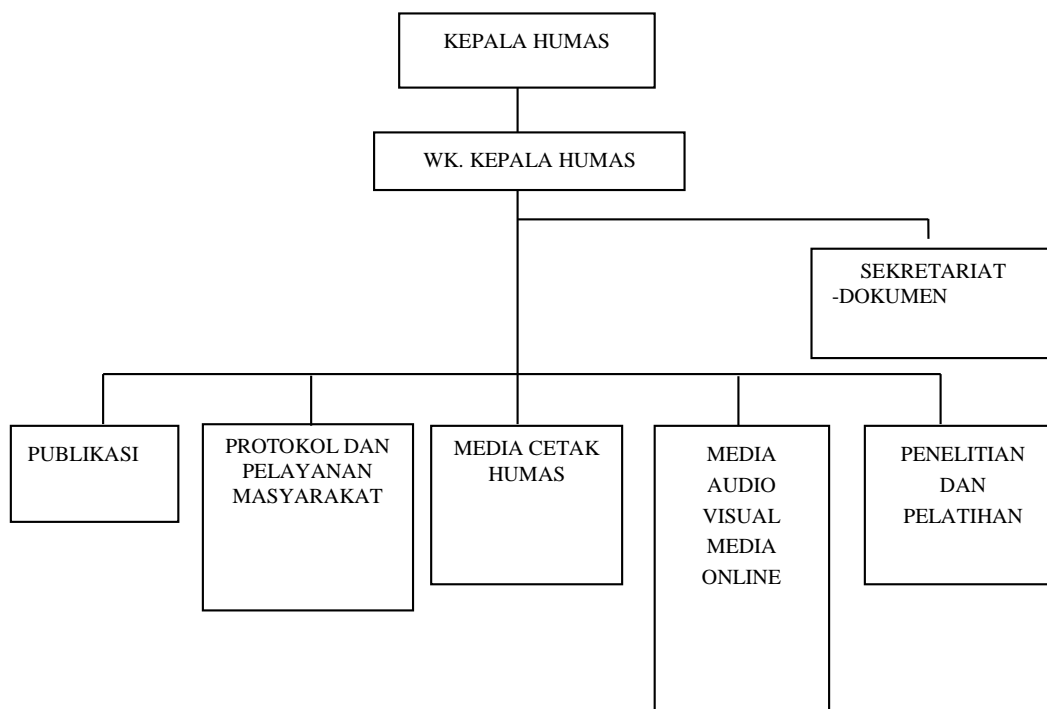
Dalam melaksanakannya, maka rektor/pimpinan yang menentukan kemana organisasi mau dibawa dan bagaimana menggerakkan semua elemen yang ada dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Khususnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) penempatan humas menjadi UPT didukung pula dengan diiberikannya status fungsional bagi praktisi/staf humas di instansi pemerintah dan PTN, sehingga dengan perubahan status tersebut praktisi/staf humas tidak lagi sebagai tenaga administrasi. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 117/KEP/M.PAN/10/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan angka kreditnya. Untuk menindaklanjuti Kepmenpan tersebut kemudian diterbitkan Keputusan Bersama Lembaga Informasi Nasional (LIN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 01/SKB/KA. LIN/2003 dan Nomor 48 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya.¹⁴

Dengan demikian untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan kepala humas harus mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan bersama tersebut sekaligus memberikan peluang untuk memperkuat meletakkan posisi humas menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) humas dalam organisasi perguruan tinggi di negeri maupun swasta. Apabila humas dijadikan UPT, dalam struktur organisasi humas bisa dikembangkan menjadi pembagian kerja pada masing-masing unit, yakni: publikasi, protocol dan pelayanan masyarakat, media cetak humas, media audio visual, penelitian dan pelatihan.

¹³. Zulkarnaen Nasution, *Manajemen humas*, hlm. 77.

¹⁴. Zulkarnaen Nasution, *Manajemen humas*, hlm. 78.

Contoh: struktur Humas di perguruan tinggi sebagai berikut:



Kesimpulan

Dari pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa posisi Humas pada perguruan tinggi merupakan hal yang sangat krusial, keberadaan humas pada perguruan tinggi saat sekarang masih belum maksimal, penempatan humas tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, yang mana struktur humas merupakan unit pelaksana teknis (UPT), baik pada organisasi negeri maupun swasta. Namun Sebagian besar perguruan tinggi Negeri memposisikan struktur humas diletakkan pada struktur paling bawah, yakni pada Sub Bagian (Subbag), sehingga dengan kedudukan ini membuat strategi dan aktivitas humas selalu mendapat hambatan khususnya pada birokrasi di Perguruan Tinggi dalam menerima dan menyampaikan informasi, saran, dan pendapat tersebut. Misalnya, banyak humas di perguruan tinggi yang meletakkan struktur humas pada tingkat paling bawah dan bahkan yang menjadi keprihatinan, kedudukan humas itu tidak ada didalam suatu struktur organisasi pada perguruan tinggi, karena kebanyakan pemimpin lembaga perguruan tinggi menganggap peran humas tidak begitu penting dalam upaya mengembangkan lembaganya.

Jika dilihat dari peran dan fungsinya ternyata humas mempunyai andil juga dalam menciptakan citra positif lembaga perguruan tinggi, karena adanya komunikasi masyarakat dengan perguruan tinggi akan saling memberikan kontribusi, baik moril maupun material, namun jika struktur humas tidak jelas dalah posisinya, maka komunikasi yang dihasilkan akan cenderung menguntungkan sepihak atau bersifat *one way* bukan *two way*. Komunikasi akan dipandang sebagai pemanfaatan belaka bagi masyarakat untuk meraup banyak keuntungan.

Daftar Pustaka

- Baharuddin & Moh Makin, Manajemen Pendidikan Islam, Transformasi Menuju Sekolah/Madrasah Unggul, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemah*, Jakarta: Al Huda, 2005
- E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Fahmi Ihram, *MANAJEMEN, Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Fatah Yasin Ahmad, Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam, Malang: UIN-Malang Press 2012
- Handoko T. Hani, *MANAJEMEN Edisi Kedua*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009
- Haryanto, A., & Setiawan, M. (2022). *Peran Humas dalam Pembangunan Citra Perguruan Tinggi*. Surabaya: Penerbit Andi
- Hidayat Dani, *Bulughul Maram versi 2.0* © 1429 H / 2008 M Oleh : Pustaka Al-Hidayah, Hadits
- MENPAN, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara No.117/KEP/M/.PAN/10/2003, tentang jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat dan angka keriditnya.
- Mohyi Achmad, *Teori dan Perilaku Organisasi*, Malang: UMM Press 1999
- Nasution Zulkarnain, Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan, Konsep, Penomena dan Aplikasinya, Malang: UMM Press, 2010
- Suharsaputra Uhar, Manajemen Perguruan Tinggi Strategi Menghadapi Perubahan, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.